



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

(0271) 655772  Jl. Tentara Pelajar No.5, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2025-2029

KOTA SURAKARTA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I.....	6
PENDAHULUAN.....	6
1.1 LATAR BELAKANG	6
1.2 LANDASAN HUKUM	7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA	9
BAB II	12
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	13
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	13
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta	22
2.1.3 Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta	24
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.....	31
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	32
BAB III.....	39
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	39
3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN	39
3.1.1 Visi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029	39
3.1.2 Misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029	42
3.1.3 Tujuan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran.....	42
3.2 SASARAN RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029	43
3.3 STRATEGI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.....	46
3.4 ARAH KEBIJAKAN	50
BAB IV	52
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52

4.1 URAIAN PROGRAM	52
4.2 URAIAN KEGIATAN	84
4.3 SUB KEGIATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	84
4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	96
4.4.1 Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	96
4.4.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	97
BAB V	98
PENUTUP	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.....	14
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan SDM Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.....	22
Tabel 2. Golongan SDM Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta	23
Tabel 3. Tingkat Pendidikan SDM Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.....	23
Tabel 4. Sumber Daya Aset.	24
Tabel 5. Rentang Penilaian Kinerja	25
Tabel 6. Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.....	26
Tabel 7. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta	29
Tabel 8. Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.....	30
Tabel 9. Permasalahan Perangkat Daerah-Dinas Damkar Kota Surakarta.....	33
Tabel 10. Analisa Faktor Internal dan Eksternal.....	36
Tabel 11. Isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran	37
Tabel 12. Tujuan, Sasaran, Indikator Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.....	44
Tabel 13. Tabel Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	45
Tabel 14. Tabel Keterkaitan Strategi dan Bentuk Keselarasan dan Dukungan OPD dengan Strategi Kota Surakarta.....	47
Tabel 15. Analisis SWOT dalam Penentuan Alternatif Arah Kebijakan	49
Tabel 16. Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan	50
Tabel 17. Indikator Kinerja Utama	52
Tabel 18. Indikator Kinerja Daerah	57
Tabel 19. Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran.....	58
Tabel 20. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	70
Tabel 21. Indikator Kinerja Daerah	84
Tabel 22. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan	92
Tabel 23. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	96
Tabel 24. Indikator Kinerja Kunci	97

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 Tahun, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) jangka waktu 5 Tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD dan Renja) untuk jangka waktu 1 Tahun. Sebagai salah satu dinas pemerintahan, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta mempunyai tanggung jawab untuk menyusun perencanaan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan masyarakat dan aset-aset vital kota dari ancaman kebakaran dan keadaan darurat lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika pembangunan Kota Surakarta yang semakin pesat, ditandai dengan peningkatan jumlah bangunan, kepadatan penduduk, serta aktivitas ekonomi, telah berdampak langsung pada meningkatnya potensi risiko kebakaran dan insiden kedaruratan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan strategis yang komprehensif untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas Dinas Pemadam Kebakaran dalam menghadapi tantangan tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2025–2029 didasarkan pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025–2029 ke dalam kebijakan dan program kerja dinas.

Selain itu, Renstra ini disusun untuk menjawab tantangan perubahan iklim, urbanisasi, serta kompleksitas kebutuhan layanan keselamatan masyarakat yang semakin tinggi. Dalam

kerangka reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Pemadam Kebakaran juga dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme personel, pemanfaatan teknologi informasi, dan keterpaduan dengan sistem penanggulangan bencana daerah.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta mampu menjadi institusi yang responsif, tangguh, dan terpercaya dalam mewujudkan kota yang aman dan tanggap darurat. Dokumen ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan secara terarah, efektif, efisien, serta selaras dengan tujuan pembangunan Kota Surakarta yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 berpegang pada landasan hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833). Diubah dengan PP No.13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, mencabut PP No 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91).
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041.
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2045.
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 168.
13. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
14. Surat Edaran Wali Kota Surakarta Nomor 8/RP.0.01/1300/2025 tentang pedoman penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah dan pohon kinerja di lingkungan pemerintah Kota Surakarta Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dan program Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2025-2029 ke dalam bentuk strategi, kebijakan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 sebagai acuan dasar Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang beberapa poin, yaitu:

1. Latar belakang;
2. Landasan hukum;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURAKARTA

1. Subbab Gambaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta;
 - b. Sumber daya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta;
 - c. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta (termasuk capaian SPM sesuai tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan.

2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta memuat;
 - a. Permasalahan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta; dan
 - b. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan memuat:

1. Tujuan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2025-2029;
3. Strategi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2025-2029; dan
4. Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebakaran memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah Pemerintah Surakarta telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang akan ditranslasikan kedalam rencana strategis perangkat daerah.

Visi Misi Walikota terpilih tahun 2025-2029 mengusung visi **"Gotong Royong Mewujudkan Surakarta Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan"**. Dalam mewujudkan visi tersebut maka dituangkan kedalam Misi yang diusung berupa:

1. Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan sosial untuk semua
2. Berbudaya untuk kemajuan dan ketahanan sosial
3. Daya saing ekonomi untuk kesejahteraan
4. Inovasi birokrasi untuk pelayanan publik yang adaptif dan inklusif
5. Ketahanan kota dan kerjasama wilayah terpadu dan berkelanjutan.

Dinas Pemadam Kebakaran memiliki kontribusi terhadap pencapaian Misi ke – 5 yang mengarahkan pada **"Ketahanan kota dan kerjasama wilayah terpadu dan berkelanjutan"**, Misi ke-5 berfokus pada mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang aman, tangguh, demokratis, inklusif dengan sarana prasarana terpadu, ramah lingkungan berbasis kemitraan antar wilayah. Misi Ketahanan Kota dan Kerjasama Antar Wilayah yang Terpadu dan Berkelanjutan bertujuan untuk menjadikan Kota Surakarta sebagai kota yang tangguh, aman, dan berdaya saing melalui penguatan sistem ketahanan perkotaan serta sinergi pembangunan dengan daerah sekitarnya. Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kota Surakarta memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan sistem infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan. Kontribusi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam mewujudkan ketahanan kota dalam sub urusan kebakaran akan diwujudkan melalui program dan kegiatan mengenai meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah tangguh bencana.

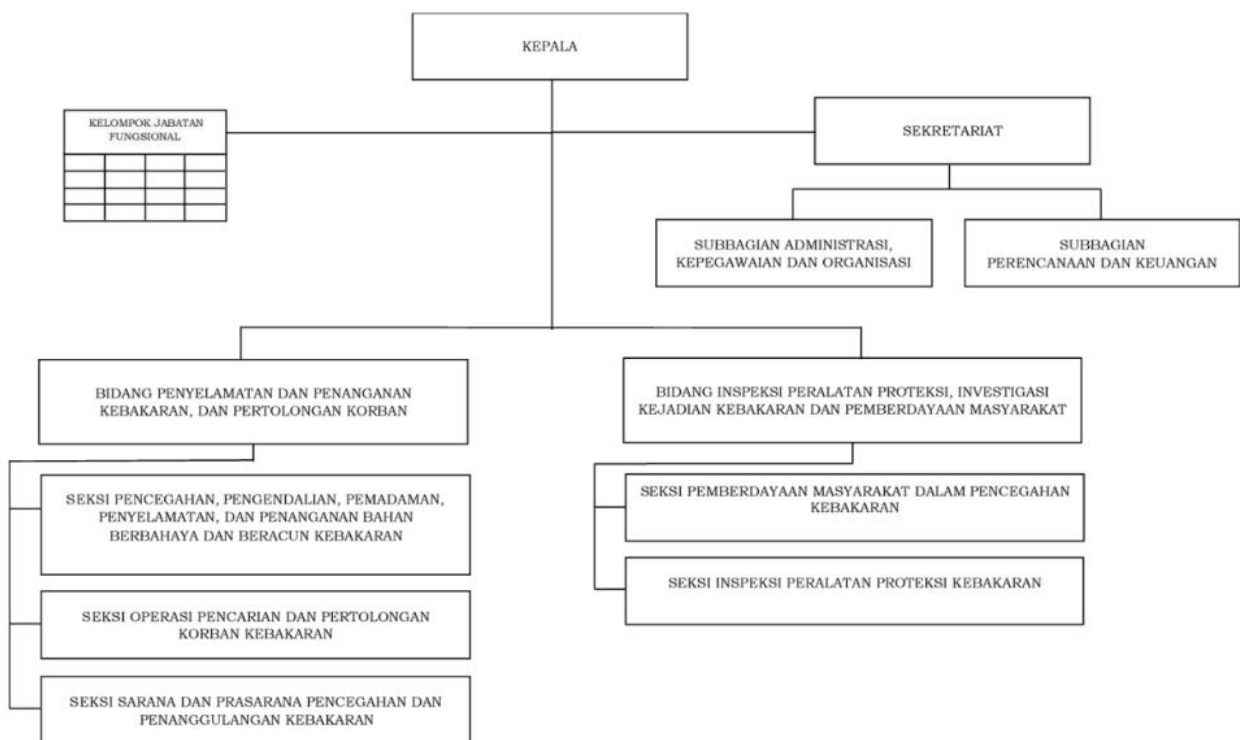
2.1 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah bahwa Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah. Adapun susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Jabatan Fungsional lainnya.
- c. Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran dan Pertolongan Korban terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Bahaya dan Beracun Kebakaran;
 2. Seksi Operasi Pencarian dan Pertolongan Korban Kebakaran;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- d. Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
 2. Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara jelasnya, struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran tercantum pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

Dinas Pemadam Kebakaran memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijakan terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan keuangan serta umum, kepegawaian dan organisasi;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas masing-masing jabatan sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas diuraikan sebagai berikut:

Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sekretariat

1. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - c. Jabatan Fungsional lainnya.
2. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
3. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi sekretariat.

Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi

Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan kelembagaan, tata laksana dinas, surat menyurat, pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan pelayanan umum dinas, pengadaan dan penatausahaan barang milik daerah pada dinas.

Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi mempunyai uraian tugas:

- a. Mendiagnosis struktur/ kelembagaan/tata laksana/proses bisnis yang efektif untuk instansi pemerintah;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis, ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan hubungan kerja;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pelayanan publik;
- d. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. menyusun data dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada dinas;
- g. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait produk hukum daerah;

- h. menganalisis proses penyusunan kebutuhan ASN;
- i. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan ASN;
- j. menyusun dokumen standar kompetensi jabatan lingkup dinas;
- k. menganalisis proses penugasan ASN;
- l. menyusun rencana pengembangan individu pegawai (*individual development plan*);
- m. menyusun peta strategi (*strategy map*) unit kerja/organisasi/instansi pemerintah;
- n. mengelola proses manajemen kinerja pegawai;
- o. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat; jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa peralatan dan perlengkapan dinas;
- p. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada dinas;
- q. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum dinas;
- r. menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- s. menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- t. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
- u. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat koordinasi, konsultasi dinas dan fasilitasi kunjungan tamu;
- v. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
- w. menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah pada dinas;
- x. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada dinas;
- y. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah pada dinas;
- z. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- â. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas terkait pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, serta pengelolaan administrasi keuangan dinas, dan administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun dokumen perencanaan dinas;
- b. menyusun dokumen RKA-dinas dan perubahan RKA-dinas;
- c. menyusun DPA-dinas dan perubahan DPA-dinas;
- d. menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
- e. memformulasikan sajian untuk analisis;
- f. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
- g. menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
- h. menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
- i. menguji alternatif kriteria dan model;
- j. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek pada lingkup dinas;
- k. menyusun perencanaan program dan kegiatan bidang;
- l. menyusun perencanaan program dan kegiatan lingkup dinas;
- m. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;
- n. melakukan telaahan lingkup dinas terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
- o. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada lingkup dinas;
- p. melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi daerah;
- q. melaksanakan analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah;
- r. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah;
- s. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah;
- t. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;
- u. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;
- v. melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi daerah;
- w. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan ASN
- x. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan dinas;

- y. menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
- z. menyusun laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran dan akhir tahun dinas;
- å. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan pemeriksaan;
- ä. menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- ö. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dan Pertolongan Korban

Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dan Pertolongan Korban dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penyelamatan, Penanganan Kebakaran, dan Pertolongan Korban mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, operasi pencarian dan pertolongan korban kebakaran, serta sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dan Pertolongan Korban mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran serta penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran serta penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran serta penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;
- d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai fungsinya.

Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dan Pertolongan Korban terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;

Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas sesuai keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dan Pertolongan Korban.

Seksi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran

Seksi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pencegahan, pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- b. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
- c. melaksanakan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan

Seksi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait standarisasi dan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- b. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- c. melaksanakan pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
- d. melaksanakan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK);
- e. melaksanakan penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- f. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Kepala Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- b. penyelenggaraan inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;

- d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
- b. melaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
- c. melaksanakan dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran.

Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
- b. melaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
- c. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

2.1.2.1 Suumber Daya Manusia

Pada tahun 2024, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 83 pegawai, yang terdiri dari 76 ASN laki-laki dan 7 ASN perempuan. ASN terbanyak adalah pada jabatan Pranata Pemadam Kebakaran Pemula sebanyak 30 ASN dan pada jabatan Staf Seksi Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran sebanyak 25 ASN. Untuk rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Tingkat Pendidikan SDM Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

No	Jabatan		L	P	Jumlah
1	Kepala Dinas		1		1
2	Sekretaris		1		1
	a	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1		1
		Staf Subag Perencanaan dan Keuangan	3	2	5
	b	Kasubag Administrasi Kepegawaian dan Organisasi		1	1
		Staf Administrasi Kepegawaian dan Organisasi	2	1	3
	c	Pranata Komputer		1	1
3	Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dan Pertolongan Korban		1		1
	a	Kasi Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	1		1
		Staf Seksi Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	25		25
	b	Analisis Kebakaran	1		1
	c	Pranata Pemadam Kebakaran Pemula	28	2	30
	d	Kasi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1		1
		Staf Seksi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1		1
4	Kepala Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat		1		1
	a	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1		1
		Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	4		4
	b	Kasi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1		1
		Staf Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	3		3
Total ASN di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta			76	7	83

Golongan dan pangkat ASN dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta terbagi menjadi 6 pangkat dan golongan. ASN dengan jumlah terbanyak terdapat pada Golongan II, yaitu sebanyak 47 orang. Untuk rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Golongan SDM Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	4	0	4
2	Golongan III	18	3	21
3	Golongan II	44	3	47
4	Golongan I	5	0	5
5	TKPK	33	3	36
6	OC	19	3	22
Jumlah Pangkat dan Golongan ASN				135

Pegawai di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 5 orang merupakan lulusan S2. Untuk lulusan S1 sebanyak 12 orang sedangkan jumlah terbanyak adalah pada pegawai lulusan SMA, yaitu sebanyak 109 orang. Uraian rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Tingkat Pendidikan SDM Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1	S2	4	1	5
2	S1	11	1	12
3	D3	0	2	2
4	SMA	100	9	109
5	SMP	5	0	5
6	SD	5	0	5
Jumlah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan				138

2.1.2.2 Sumber Daya Aset

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, secara umum jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih belum mencukupi. Saat ini hanya terdapat 13 unit mobil pemadam kebakaran yang tersedia.

Dalam upaya pemadaman kebakaran, diperlukan berbagai sarana dan prasarana penunjang, termasuk mobil pemadam kebakaran, khususnya mobil tangga yang dibutuhkan untuk menjangkau gedung bertingkat. Selain itu, diperlukan pula peralatan lain seperti Alat

Pemadam *Portable*, Pompa Kebakaran, Pipa Pemancar, Pakaian Panas/Lengkap, Selang, APAR, Mesin Gergaji, serta alat cuci motor bertekanan tinggi.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Sumber Daya Aset.

No	Jenis	Jumlah
1	Mobil Pemadam Kebakaran	13
2	Mobil Tangki	3
3	Mobil Tangga	1
4	Mobil <i>Pick Up</i>	1
5	Alat <i>Rescue</i> /Pemyelamatan	7
6	Selimut Tahan Api	3
7	Baju Tahan Api	1
8	Baju Tahan Panas	64
9	APAR	46
10	NOZZLE	31
11	<i>Y Connection</i>	20
12	Selang Pemadam Kebakaran	189
13	SCBA	9
14	<i>Dump Truck</i>	1
Jumlah Sarana Prasarana		389

Pada tahun 2021, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta hanya memiliki tiga kantor dan pos, yaitu Kantor Induk Pedaringan, Pos Kota Barat, dan Pos Gading. Namun, kantor tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan. Mengingat kondisi jalan di Kota Surakarta yang semakin padat dan adanya jalur rel kereta di tengah kota, diperlukan penambahan dua pos pemadam kebakaran lagi untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah utara dan barat kota.

2.1.3 Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya dengan menggunakan pengukuran skala ordinal dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 5. Rentang Penilaian Kinerja

Rentang Nilai	Kategori
$n < 55$	Tidak Berhasil
$55 < n \leq 70$	Cukup Berhasil
$70 < n \leq 85$	Berhasil
$n > 85$	Sangat Berhasil

Dengan interpretasi sebagai berikut :

- Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat berhasil dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
- Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja berhasil dan sesuai ekspektasi.
- Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja cukup berhasil namun masih dibawah ekspektasi/target.
- Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja tidak berhasil dan di bawah ekspektasi/target.

Bila hal tersebut diimplementasikan pada capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

No	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Persentase Pencapaian					Kategori
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) di Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran dari Pangkalan Damkar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil
2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil
3	Layanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	Sangat Berhasil
4	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Satlakar, dan atau Komunitas Masyarakat Lainnya) yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	Sangat Berhasil
5	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	Sangat Berhasil
6	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	%	69.76	75	-	-	-	75	69.76	-	-	-	107.51	93.01	-	-	-	Sangat Berhasil

No	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Persentase Pencapaian					Kategori
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
7	Persentase Gedung Pelayanan Pemerintah dan Swasta yang Memiliki Sarana Proteksi Kebakaran	%	75	100	-	-	-	75	100	-	-	-	100	100	-	-	-	Sangat Berhasil
8	Nilai PMPRB	Nilai	-	N/A	13.8	13.9	-	-	13.8	34.1	34.1		-	-	247.10	245.32	-	Sangat Berhasil
9	Nilai Maturitas Kelembagaan	Nilai	-				45	-			48		-	-	-	106.67	-	Sangat Berhasil
10	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	-	100		100	100	-	100		100	100	-	100	-	100	100	Sangat Berhasil
11	Nilai SAKIP	Nilai	-	66.58	67	68	69	-	66.58	68.65	70.6	77.5	-	100	102.46	103.82	112.32	Sangat Berhasil
12	Nilai SKM	Nilai	-	79	80	81	82	-	80	81	94.52	91.86	-	101.27	101.25	116.69	112.02	Sangat Berhasil
13	Nilai Maturitas Kelembagaan	Level	-	1	1	1		-	4	4	4		-	400	400	400	-	Sangat Berhasil
14	Nilai SPIP	Nilai	-	2.281	2.4	3	3	-	1.387	2.38	3.99	4.16	-	60.81	99.17	133	138.67	Sangat Berhasil

Indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta mengalami perubahan. Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa indikator yang terdapat pada tahun 2020 dan 2021 tidak lagi dicantumkan pada tahun 2022, 2023, dan 2024.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta sudah sangat berhasil. Hal ini ditandai dengan nilai realisasi yang selalu melebihi target yang ditetapkan pada tahun tersebut. Indikator Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) di Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran dari Pangkalan Damkar, yang merupakan indikator dari tujuan OPD, dan indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota, yang merupakan indikator Sasaran 1, serta indikator Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, yang merupakan indikator dari Sasaran Program 1, pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing memiliki persentase capaian ”sangat berhasil” (100%). Demikian pula pada indikator Nilai SAKIP, Nilai SKM, Nilai Maturitas Kelembagaan, dan Nilai SPIP yang nilai rata-rata persentasenya diatas 100% dengan kategori capaian ”sangat berhasil”.

Kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam menangani kebakaran dan evakuasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kebakaran yang Tertangani	57	64	87	140	127
2	Jumlah Evakuasi yang Tertangani	251	352	514	580	757

Jika dibandingkan antara tahun yang tertera pada tabel, tahun 2018 merupakan tahun dengan jumlah kebakaran tertangani yang terbanyak, yaitu 187 kejadian. Sedangkan untuk jumlah evakuasi yang tertangani terbanyak adalah pada tahun 2020 dengan jumlah 251 kejadian.

Sedangkan, untuk perbandingan realisasi dengan target capaian anggaran dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Dimana capaian anggaran diatas 90% dan masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

NO	PROGRAM	ANGGARAN					REALISASI					PERSENTASE REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Pengembangan Perumahan		323,152,138					316,407,044					98			
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran		435,553,900	1,687,491,719	1,687,491,719	6,013,084,614		422,506,700	1,644,854,850	1,644,854,850	5,750,600,650		97	97	97	96
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		8,100,000					8,075,000					100			
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		54,638,201	92,255,200				52,371,000	92,126,200				96	100		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7,693,683,256	9,972,744,626	12,796,822,416	12,452,507,060		7,615,701,782	9,706,661,790	12,293,955,985	11,752,683,072		99	97	96	94
TOTAL			8,549,659,375	11,752,491,545	15,535,326,811	18,465,591,674		8,499,046,708	11,443,607,640	14,898,529,285	17,476,283,732		99	97	96	95

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Surakarta memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan masyarakat dari ancaman kebakaran serta penanggulangan bencana terkait kebakaran. Sebagai instansi pelayanan publik, Damkar memiliki kelompok sasaran layanan yang beragam guna memastikan layanan yang diberikan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara efektif. Masyarakat umum merupakan sasaran pelayanan Damkar terutama dalam hal edukasi tentang pencegahan kebakaran. Dalam hal ini, Damkar aktif memberikan sosialisasi mengenai langkah-langkah mitigasi risiko kebakaran, seperti penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), prosedur evakuasi, dan cara menghubungi layanan darurat. Edukasi ini diberikan baik melalui kegiatan langsung di lingkungan masyarakat maupun melalui media massa dan media sosial.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta tidak hanya berfungsi sebagai penanggulangan kebakaran, tetapi juga berkoordinasi dengan berbagai mitra perangkat daerah untuk memastikan efektivitas layanan pencegahan dan penanganan kebakaran. Setiap mitra perangkat daerah berfungsi untuk mendukung tugas dan fungsi Damkar, baik dalam pencegahan, mitigasi, maupun penanggulangan kebakaran. Mitra perangkat daerah yang menjadi kelompok sasaran layanan Damkar adalah sebagai berikut :

a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Hubungan antara Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan kemitraan strategis yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan tugas pemadaman kebakaran. Salah satu bentuk utama kerja sama ini adalah penyediaan sumber air, di mana PDAM menyediakan *hydrant* umum di berbagai titik strategis kota yang dapat digunakan oleh Damkar saat terjadi kebakaran. PDAM juga bertanggung jawab memastikan tekanan dan debit air yang tersedia mencukupi agar bisa langsung dimanfaatkan dalam kondisi darurat. Selain itu, PDAM dapat menyediakan tangki air cadangan atau mobil tangki air untuk membantu pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau jaringan air.

Kemitraan ini juga melibatkan koordinasi teknis, seperti pemeliharaan dan pemeriksaan rutin terhadap *hydrant*, serta pelaporan jika ada kerusakan. Jika terjadi

gangguan distribusi air, PDAM akan segera menginformasikannya kepada Damkar agar langkah antisipatif dapat dilakukan. Dalam konteks perencanaan tata kota, kedua instansi ini juga bekerja sama untuk menentukan lokasi strategis pemasangan *hydrant* dan jaringan air di wilayah padat penduduk atau rawan kebakaran. Selain itu, Damkar dan PDAM kerap berkolaborasi dalam simulasi kebakaran guna menguji kesiapan sistem *hydrant* dan distribusi air.

Kerja sama ini diperkuat melalui pelatihan dan edukasi, baik bagi petugas internal maupun masyarakat, agar lebih memahami pentingnya menjaga sarana *hydrant* dan akses air. Dengan sinergi yang baik antara Damkar dan PDAM, respon terhadap kebakaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif, sehingga risiko kerugian jiwa maupun harta benda dapat diminimalkan.

b. Pihak Swasta

Dinas Pemadam Kebakaran menjalin kerja sama dengan berbagai pihak swasta untuk mendukung kelancaran tugas pemadaman, terutama dalam hal pasokan air. Pengusaha kolam renang menjadi mitra strategis karena kolam dapat dimanfaatkan sebagai sumber air alternatif saat terjadi kebakaran besar atau ketika akses air terbatas. Selain itu, Damkar juga bekerja sama dengan penyedia *blow tank* atau tangki air swasta untuk membantu suplai air ke lokasi kebakaran, terutama di daerah yang tidak terjangkau *hydrant*. Kerja sama lainnya melibatkan pengelola gedung, kawasan industri, hotel, dan apartemen yang wajib memiliki sistem proteksi kebakaran serta bersinergi dengan Damkar dalam pelatihan, inspeksi, dan evakuasi. Kolaborasi ini memperkuat sistem penanggulangan kebakaran sekaligus membangun kesadaran dan kesiapsiagaan di kalangan pelaku usaha.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa

lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal, telaah rencana strategis kota, dan RTRW Kota Surakarta.

Terdapat berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran yang optimal. Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Wali Kota Surakarta No 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta berada pada lingkup tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Permasalahan Perangkat Daerah-Dinas Damkar Kota Surakarta

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
1	Aspek penyelamatan dan penanganan kebakaran dan pertolongan korban	Terbatasnya jumlah SDM pada aspek pemadaman dan penyelamatan	Tingkat kerapatan penduduk di Kota Surakarta merupakan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dalam mewujudkan Misi ke-5 Kota Surakarta dengan sasaran "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah tangguh bencana" perlu mempertimbangkan penambahan SDM atau meningkatkan tingkat partisipasi relawan.
		Perlu peningkatan kompetensi SDM dalam hal penyelamatan.	Tingginya kepercayaan masyarakat pada Dinas Pemadam Kebakaran terlebih dalam hal penyelamatan membuat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta terus berbenah dalam peningkatan kompetensi SDM aspek penyelamatan seperti evakuasi hewan dan non hewan beserta kelengkapan APD nya.

		Terbatasnya sarana dan prasarana	Sarpras yang sudah melebihi usia penggunaan sehingga diperlukan peremajaan maupun penambahan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan.
		Terbatasnya penyebaran informasi berbasis digitalisasi	Berdasarkan arahan dari Inmendagri No 2 Tahun 2025, bahwasanya Dinas Pemadam Kebakaran memiliki mandat cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran sehingga perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan mengoptimalkan sistem IT atau digitalisasi.
		Kesadaran pemilik usaha untuk penyediaan APAR sesuai ketentuan masih rendah.	Mudahnya perizinan yang diterbitkan belum didukung dengan survey ketersediaan alat proteksi kebakaran baik di tempat usaha, tempat keramaian, dan sebagainya.
2	Aspek Inspeksi, Investigasi, dan Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimalnya tingkat partisipatif relawan dalam pencegahan, penanganan, dan penyelamatan.	Peningkatan keterampilan bagi relawan damkar, baik dalam proses pencegahan, penanganan, penyelamatan.
		Keterbatasan keterampilan SDM dalam pelatihan instruktur dan inspektur	Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi pelatihan instruktur maupun inspektur dalam inspeksi kebakaran masih terbatas.

Adapun penentuan isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dilakukan dengan menggunakan metode SWOT. Analisa SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunistis, Threats*) adalah suatu bentuk analisis di dalam organisasi yang secara

sistematis dapat membantu dalam penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan organisasi, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Analisis SWOT diperlukan untuk menyusun perencanaan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam mencapai visi dan misi, melalui analisa SWOT dapat dilakukan identifikasi dan klasifikasi secara kuantitatif terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya organisasi, melihat berbagai alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman berikut alternatif solusinya. Berikut merupakan hasil pemetaan analisis SWOT berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada.

Tabel 10. Analisa Faktor Internal dan Eksternal

	KEKUATAN	KELEMAHAN
Analisa Internal	1. Dukungan, arahan, dan komitmen dari Pimpinan Dinas dalam pengambilan keputusan. 2. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Dinas Damkar.	1. Terbatasnya SDM Dinas Damkar yang memiliki sertifikasi keterampilan instruktur dan inspektur inspeksi kebakaran. 2. Keterbatasan anggaran dalam pembinaan relawan pemadam kebakaran. 3. Bentuk kerjasama dengan beberapa OPD dalam pencegahan dan penanganan kebakaran maupun penyelamatan masih belum dilakukan secara <i>massive</i> dan tersistem 4. Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki fokus kompetensi dalam aspek penyelamatan hewan dan non hewan
	PELUANG	TANTANGAN
Analisa Eksternal	1. Variasi <i>platform</i> berbasis digital yang dapat digunakan dalam penyebarluasan informasi terkait pencegahan dan penanganan kebakaran 2. Meningkatnya sektor usaha di beberapa bidang yang memiliki fasilitas yang dapat membantu dalam pencegahan dan penanganan kebakaran. 3. Meningkatnya tren permintaan akan penyelamatan dibandingkan pemadaman dimasyarakat baik penyelamatan hewan maupun non hewan 4. Semakin bertambahnya komunitas dalam penyelamatan hewan yang berkembang di masyarakat	1. Tingginya kepadatan penduduk di Kota Surakarta dengan status kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. 2. Peningkatan lalu lintas di Kota Surakarta, Pertumbuhan bangunan bertingkat yang di iringi dengan pertumbuhan penduduk sehingga berdampak pada proses penanganan saat terjadinya bencana kebakaran.

Tabel 11. Isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dan Pertolongan Korban	• Terbatasnya SDM Dinas Damkar yang memiliki sertifikasi keterampilan instruktur dan inspektur inspeksi kebakaran. • Keterbatasan anggaran dalam pembinaan relawan pemadam kebakaran. • Bentuk kerjasama dengan beberapa OPD dalam pencegahan dan penanganan kebakaran maupun penyelamatan masih belum dilakukan secara <i>massive</i> dan tersistem. • Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki fokus kompetensi dalam aspek penyelamatan hewan dan non hewan. • Peningkatan lalu lintas di Kota Surakarta, Pertumbuhan bangunan bertingkat yang di iringi dengan pertumbuhan penduduk. • Sarana dan prasarana yang masih belum memadai bahkan sebagian unit sudah mulai tua, sumber air yang terbatas terutama saat musim kemarau (debit air kecil).	• Peningkatan kualitas SDM • Perlunya pemerataan pembangunan di segala bidang secara adil • Bahaya kebakaran listrik • Perlunya pembangunan yang mengantisipasi kemungkinan pengaruh bencana sosial • Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk		• Isu Tata Kelola Pemerintahan : pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas	• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia • Pemerataan Infrastruktur Dasar Perkotaan • Kerawanan Bencana • Keterbatasan Lahan untuk Pengembangan Perkotaan	• Pembangunan kualitas infrastruktur yang harus disertai dengan pola penanganan terpadu guna menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi resiko kerusakan lingkungan, dan kerugian akibat bencana dengan tetap berpedoman pada rencana tata ruang. • Mendorong akses pendidikan dan peningkatan pelatihan terhadap penguasaan keterampilan hidup (<i>life skill</i>) dan kecakapan kerja (vokasional) menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing SDM serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat	- Kesadaran pemilik usaha untuk penyediaan APAR sesuai ketentuan masih rendah. - Kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran masih rendah. - Terbatasnya anggaran untuk pembinaan relawan penanganan kebakaran. - Lokasi penyimpanan tandon air di tempat2 publik (tempat ibadah, rumah sakit, gedung bertingkat) yang belum cukup memadai. - Kondisi ketersediaan APAR dan <i>hydrant</i> yang sudah usang (melebihi usia pakai). - Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi inspektur dan instruktur masih sangat terbatas.	- Bahaya kebakaran listrik - Pemanfaatan digital untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan komunikasi publik belum optimal - Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. - Pembangunan wilayah dan penyediaan sarana prasarana kebutuhan dasar dan penunjang ekonomi daerah yang belum memadai, merata dan terpadu dengan pembangunan kawasan. - Peningkatan kualitas SDM.			- Pemerataan Infrastruktur Dasar Perkotaan - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	- Peningkatan keterampilan bagi relawan damkar, baik dalam proses pencegahan, penanganan, penyelamatan. - Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi pelatihan instruktur maupun inspektur dalam inspeksi kebakaran masih terbatas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

3.1.1 Visi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017). Visi pembangunan daerah merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 mengusung visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta periode 2025-2030 dengan visi :

“Gotong Royong mewujudkan Surakarta Berbudaya, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.”

Adapun penjelasan unsur Visi sebagai berikut;

Surakarta Berbudaya adalah kota yang mengintegrasikan dua dimensi utama budayanya, yaitu nilai dasar dan nilai instrumental, yang mencerminkan keseimbangan antara aspek *tangible* dan *intangible*. Nilai dasar, sebagai wujud *intangible*, meliputi nilai-nilai budaya Jawa adi luhung seperti religiusitas, estetika, gotong royong, dan harmoni yang menjadi spirit dalam kehidupan bermasyarakat dan berkarya. Di sisi lain, nilai instrumental, yang mencerminkan aspek *tangible*, diwujudkan melalui kemampuan masyarakat menghasilkan barang dan jasa yang relevan dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan prinsip budaya Jawa. Perpaduan antara nilai dasar dan instrumental ini menjadi fondasi ketahanan budaya, terlihat dalam warisan fisik seperti bangunan bersejarah dan benda budaya, serta perilaku masyarakat yang mencerminkan karakter dan identitas Surakarta dalam menghadapi tantangan global.

Surakarta Maju adalah kota yang memiliki identitas adaptif, tangguh, kolaboratif, inovatif, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Kota ini mampu bertahan dan fleksibel

bertransformasi menghadapi dinamika perubahan zaman dengan menjaga ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan ekologis, termasuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Melalui pendekatan kolaboratif, Kota Surakarta mengoptimalkan sumber daya internal dan eksternal untuk menciptakan manfaat luas bagi wilayah sekitarnya. Inovasi menjadi kunci, dengan mengaplikasikan kearifan lokal guna menambah nilai dan daya saing kota, mendukung ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan ekologis. Pengelolaan kota yang cerdas memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengintegrasikan sumber daya secara efektif dan efisien, menyelesaikan permasalahan publik, dan memberikan pelayanan yang inklusif serta berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan cergas (*agile*) dan adaptif, memastikan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan selalu selaras dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan nasional dan tantangan global.

Surakarta Sejahtera adalah kota dengan karakteristik khas budaya Jawa yang menjadi landasan utama pembangunan, mengedepankan harmoni dalam keberagaman dan semangat gotong royong. Keadilan sosial tercermin dari kemampuan masyarakatnya memenuhi kebutuhan dasar—pangan, sandang, papan, dan pendapatan—secara berkualitas dan berkeadilan, disertai lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari rasa takut. Nilai-nilai budaya Jawa yang adi luhung diintegrasikan ke dalam ekosistem kehidupan kota, menjadikan budaya tidak hanya sebagai identitas tetapi juga kekuatan transformasi menuju *Smart City* berkelanjutan yang tetap menghormati tradisi. Dengan demikian, Surakarta membangun kesejahteraan yang memadukan kearifan lokal dengan inovasi modern untuk kemajuan Bersama.

Surakarta Berkelanjutan adalah kota yang mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan visi berorientasi pada kemajuan sekaligus pelestarian, Surakarta membangun sistem ekonomi modern yang tetap memprioritaskan keberlanjutan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Kota ini tangguh menghadapi risiko perubahan iklim dan bencana, baik alam maupun sosial, melalui penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi. Surakarta juga mengembangkan model kolaborasi nasional dan internasional, di mana pemerintah, komunitas masyarakat, dunia usaha, dan industri berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan karakteristik ini, Surakarta tidak hanya menjadi teladan di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi dalam agenda global menuju masa depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

RPJMD Tahun 2025-2029 mendukung perkembangan berkelanjutan Kota Surakarta sebagai Pusat kegiatan Nasional (PKN). Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional

(PKN) memiliki peran strategis sebagai kawasan perkotaan yang melayani kegiatan internasional, nasional, dan lintas provinsi, sebagaimana diatur dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041. Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024, Kota Surakarta merupakan bagian dari Metropolitan Surakarta, yang memiliki mandat untuk mengembangkan pariwisata berbasis budaya, ekonomi kreatif, dan keberlanjutan lingkungan. Konsep pengembangannya diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Budaya dan Industri Kreatif (*Cultural and Creative Industry-CCI Hub*) untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan. Sebagai PKN unggul, Surakarta perlu mengembangkan infrastruktur berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengamanatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Sebagai pusat pelayanan jasa pemerintahan, sosial, dan ekonomi, keunggulan Kota Surakarta ditopang oleh regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan peran PKN dalam mendukung konektivitas antarwilayah. Pemerintah Kota Surakarta juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang mengarahkan penguatan peran kota dalam sistem perkotaan nasional. Keberhasilan PKN ditentukan oleh kemampuan kepemimpinan daerah dalam membangun sinergi dengan daerah SUBOSUKAWONOSRATEN dan pemerintah lintas wilayah.

Semangat gotong royong merupakan landasan utama dalam mewujudkan Surakarta yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Nilai ini mencerminkan kebersamaan dalam bekerja sama menyelesaikan persoalan dan berbagi tanggung jawab secara kolektif sebagai satu kesatuan masyarakat. Gotong royong juga mencakup makna srawung hubungan harmonis dalam kehidupan bersama yang memperkuat rasa persaudaraan. Dalam konteks modern, semangat ini diwujudkan melalui kolaborasi, partisipasi aktif, jejaring, klaster, dan kelompok swadaya yang memfasilitasi kerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan menanamkan gotong royong di semua aspek kehidupan, Surakarta membangun harmoni sosial, daya saing, dan keberlanjutan sebagai identitas yang khas dan relevan dengan tantangan zaman.

3.1.2 Misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh suatu organisasi sekarang untuk mencapai visinya di masa depan. Misi menggambarkan tindakan, strategi, dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Rumusan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai berikut :

1. Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan sosial untuk semua
2. Berbudaya untuk Kemajuan dan Ketahanan sosial
3. Daya saing ekonomi untuk kesejahteraan
4. Inovasi Birokrasi untuk Pelayanan Publik yang Adaptif dan Inklusif
5. Ketahanan Kota dan Kerjasama Antar Wilayah yang Terpadu dan Berkelanjutan

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Pemadam Kota Surakarta memiliki memiliki peranan dalam mewujudkan Misi ke-5 yakni **”Ketahanan Kota dan Kerjasama antar Wilayah yang Terpadu dan Berkelanjutan”**. Misi tersebut akan diselaraskan melalui penyusunan tujuan perangkat daerah tak terkecuali Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Penyelarasan misi memiliki peranan penting sebagai *tools* dalam memandu tindakan dan keputusan perangkat daerah. Melalui misi, diharapkan diperoleh rumusan berupa pernyataan tujuan yang jelas, ringkas, dan relevan serta dapat menjawab harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

3.1.3 Tujuan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2025-2029 terkait dengan pembangunan ekonomi, tujuan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 telah dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Sejahtera Berkelanjutan”

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta memiliki peranan dalam merealisasikan Tujuan Perangkat Daerah berupa

”Meningkatkan kesiapsiagaan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran”.

Adapun penjabaran dari Tujuan tersebut adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif akibat kebakaran dan bencana non-kebakaran. Ini melibatkan tindakan preventif untuk mencegah kejadian, serta tindakan penanggulangan dan penyelamatan saat terjadi bencana.

Pencegahan:

Fokus pada upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran dan bencana non-kebakaran. Ini meliputi penerapan standar keselamatan, pelatihan, edukasi masyarakat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana.

Penanggulangan:

Melibatkan tindakan untuk memadamkan kebakaran dan mengatasi dampak bencana non-kebakaran. Ini mencakup penggunaan peralatan pemadam kebakaran, evakuasi korban, dan penanganan dampak bencana lainnya.

Penyelamatan:

Fokus pada upaya menyelamatkan jiwa manusia dan harta benda dari kebakaran dan bencana non-kebakaran. Ini melibatkan tindakan evakuasi, pertolongan pertama, dan upaya pencarian dan penyelamatan.

3.2 SASARAN RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029

Tujuan merupakan pernyataan yang jelas dan terukur tentang apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam periode yang lebih pendek, biasanya 3-5 tahun, sebagai langkah menuju visi jangka panjang. Pernyataan ini berfungsi sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan dan penentuan strategi untuk mencapai visi organisasi. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai, penjabaran dari tujuan yang lebih spesifik, terukur, dan rinci dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan tersebut.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel berikut ini

Tabel 12. Tujuan, Sasaran, Indikator Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya ketahanan pangan dan ketahanan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatkan kesiapsiagaan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran”		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Pemadam Kebakaran	Nilai	81	82	83	84	85	86	
		Meningkatnya kualitas pelayanan pemadaman dan penanganan kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK) dari pangkalan pemadam kebakaran prevalensi.	%	100	100	100	100	100	100	

Tabel 13. Tabel Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
• Bekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki fasilitas pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran. • Pemanfaatan <i>platform</i> digital dan media sosial untuk memperluas edukasi masyarakat mengenai tindakan awal penanganan kebakaran dan penyelamatan (evakuasi) dengan konten materi yang bersahabat dengan masyarakat secara berkala. • Pendataan kondisi dan jumlah aset sarana prasarana penanganan kebakaran.	• Melakukan <i>Workload Analysis</i> dan menerapkan integrasi <i>Talent Management System</i> guna memenuhi kebutuhan SDM sesuai kompetensi. • Mengadakan program pelatihan/sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi SDM. • Peremajaan sarana prasarana dan fasilitas <i>hydrant</i> di beberapa titik strategis. • Integrasi sistem antara Damkar dengan Dinas OPD dan fasilitas publik terkait penanganan kebakaran maupun penyelamatan sehingga dapat dilakukan lebih cepat dan bersamaan.	• Optimalisasi kesatuan sistem pelaporan untuk tanggap bencana yang terintegrasi dengan OPD dan fasilitas publik lainnya yang terkait dengan penanganan kebakaran. • Membuat kebijakan yang menjadikan ketersediaan APAR yang memadai sebagai salah satu syarat perizinan pendirian usaha/ pembangunan gedung. • Menjalin sinergitas kemitraan dengan komunitas pecinta hewan dan OPD terkait dalam penanganan dan penyelamatan hewan dan non hewan.	• Bekerjasama dengan sekolah – sekolah, perusahaan swasta, instansi pemerintah serta tempat publik lainnya untuk memberikan pelatihan kebakaran (<i>fire drill</i>) minimal 1x dalam setahun. • Bekerjasama dengan PD tingkat Kelurahan dalam pembentukan dan pembinaan satgas relawan penanganan kebakaran di setiap RT.	• Keterlibatan Damkar dalam menetapkan kebijakan pembangunan tata ruang kota agar dapat tetap memperhatikan ketersediaan fasilitas dan sarpras penanganan kebakaran.

3.3 STRATEGI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Berdasarkan penyelarasan tujuan dan sasaran kota terhadap perangkat daerah, maka perlu adanya penentuan rangkaian rencana tindakan yang komprehensif, bertahap, dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pembangunan dan mewujudkan misi dan visi Kota Surakarta. Strategi dalam penyusunan rencana strategis adalah arah atau tindakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Strategi berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengambil keputusan dan mengalokasikan sumber daya organisasi.

Pada bagian ini akan diuraikan rekomendasi untuk sasaran strategi yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2025 – 2029. Rekomendasi didasari atas beberapa hal, yakni ruang lingkup tugas dan fungsi perangkat daerah, ketersediaan sumber daya organisasi, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan organisasi, hasil identifikasi permasalahan, hasil telaah RTRW Kota Surakarta dan KLHS, dan penentuan isu strategis. Berdasarkan hasil analisis SWOT maka didapatkan beberapa sasaran strategi yang bisa dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta untuk melakukan perbaikan dimasa depan. **Berikut hasil rekomendasi strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :**

1. Pelayanan publik yang tangkas (*agile*), adaptif, inovatif, berbasis digital
2. Penguatan landasan harmonisasi OPD, kewilayahan, masyarakat, dan relawan dalam menangani bencana kebakaran dan penyelamatan
3. Membangun budaya partisipasi publik berbasis digital
4. Perluasan integrasi perizinan yang adaptif terhadap risiko bencana kebakaran.

Dalam perumusan strategi di atas, perlu dilakukan sinkronisasi dengan strategi yang telah disusun pada cakupan Kota khususnya strategi mengenai sub urusan bencana kebakaran maupun non kebakaran. Berikut dijabarkan keterkaitan maupun bentuk keselarasan dan dukungan antara strategi OPD Damkar dengan strategi Kota.

Tabel 14. Tabel Keterkaitan Strategi dan Bentuk Keselarasan dan Dukungan OPD dengan Strategi Kota Surakarta

NO	Strategi Kota	Strategi OPD – Dinas Damkar	Bentuk Keselarasan dan Dukungan
1	Penguatan sistem mitigasi bencana perkotaan melalui edukasi publik, simulasi kebencanaan, dan teknologi pemantauan berbasis <i>Smart City</i> .	• Pelayanan publik yang tangkas (<i>agile</i>), adaptif, inovatif, berbasis digital • Membangun budaya partisipasi publik berbasis digital • Perluasan integrasi perizinan yang adaptif terhadap risiko bencana kebakaran.	Penguatan sistem mitigasi bencana kebakaran maupun non kebakaran melalui integrasi sistem antara Damkar dengan Dinas/OPD terkait berbasis <i>Smart City</i> berupa simulasi kebencanaan sehingga diharapkan penanganan kebakaran maupun penyelamatan dapat dilakukan lebih cepat dan bersamaan.
2	Penguatan kelembagaan partisipasi komunitas dan koordinasi keamanan wilayah untuk pengembangan sistem keamanan berbasis Teknologi <i>Smart dan Real Time</i> ;	Penguatan landasan harmonisasi OPD, kewilayahan, masyarakat, dan relawan dalam menangani bencana kebakaran dan penyelamatan.	Dengan adanya partisipasi dan kerjasama berbagai pihak dapat memudahkan penanganan terjadinya kebakaran melalui pengembangan sistem keamanan bencana kebakaran berbasis teknologi maupun peningkatan kompetensi melalui <i>transfer knowledge</i> .

Bentuk keselarasan dalam bentuk dukungan strategi Dinas Pemadam Kebakaran pada strategi Kota Surakarta perlu dijabarkan dalam bentuk operasional agar memudahkan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang dalam bentuk penjabaran arah kebijakan yang berisikan rincian strategi. Adapun alternatif arah kebijakan diperoleh berdasarkan analisis internal berupa (kekuatan dan kelemahan) yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran seperti jumlah dan kompetensi SDM, ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan anggaran, proses bisnis yang selaras dengan perencanaan dan lain sebagainya. Selain itu, juga dilakukan analisis eksternal berupa (peluang dan tantangan) yang dapat dioptimalkan sehingga dapat mengubah tantangan menjadi sebuah kekuatan organisasi.

Tabel 15. Analisis SWOT dalam Penentuan Alternatif Arah Kebijakan

	Analisa Internal	
	Kekuatan/ <i>Strength</i>	Kelemahan/ <i>Weakness</i>
	1. Dukungan, arahan, dan komitmen dari Pimpinan Dinas dalam pengambilan keputusan. 2. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Dinas Damkar.	1. Terbatasnya SDM Dinas Damkar yang memiliki sertifikasi keterampilan instruktur dan inspektur inspeksi kebakaran. 2. Keterbatasan anggaran dalam pembinaan relawan pemadam kebakaran. 3. Bentuk kerjasama dengan beberapa OPD dalam pencegahan dan penanganan kebakaran maupun penyelamatan masih belum dilakukan secara <i>massive</i> dan tersistem. 4. Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki fokus kompetensi dalam aspek penyelamatan hewan dan non hewan
Analisa Eksternal	SO	WO
Peluan/ <i>Opportunity</i>		
1. Variasi <i>platform</i> berbasis digital yang dapat digunakan dalam penyebarluasan informasi terkait pencegahan dan penanganan kebakaran. 2. Meningkatnya sektor usaha dibeberapa bidang yang memiliki fasilitas yang dapat membantu dalam pencegahan dan penanganan kebakaran. 3. Meningkatnya tren permintaan akan penyelamatan dimasyarakat baik hewan maupun non hewan dibandingkan pemadaman. 4. Semakin bertambahnya komunitas dalam penyelamatan hewan yang berkembang di masyarakat.	1. Optimalisasi penggunaan platform media sosial dengan kemasan konten materi yang bersahabat dengan masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran (S2O1) 2. Bekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki fasilitas pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran. 3. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penanganan awal terhadap penyelamatan non kebakaran (S1O3) 4. Menjalin kemitraan dengan berbagai komunitas terkait <i>rescue</i> dalam penanganan dan penyelamatan non kebakaran (S2O4)	1. Integrasi sistem antara Damkar dengan Dinas OPD terkait sehingga penanganan kebakaran maupun penyelamatan dapat dilakukan lebih cepat dan bersamaan. (W3O1) 2. Meningkatkan sinergisitas antar OPD terkait khususnya dalam hal penyelamatan khususnya non hewan (W3O3) 3. Pembuatan satuan tugas disetiap badan usaha untuk membantu dalam pencegahan dan penanganan kebakaran (W2O2)
Tantangan/ <i>Threat</i>	ST	WT
1. Tingginya kepadatan penduduk di Kota Surakarta adalah yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. 2. Peningkatan lalu lintas di Kota Surakarta, Pertumbuhan bangunan bertingkat yang di iringi dengan pertumbuhan penduduk sehingga berdampak pada proses penanganan saat terjadinya bencana kebakaran.	1. Membuat kebijakan yang menjadikan ketersediaan APAR yang memadai sebagai salah satu syarat perizinan pendirian usaha/ pembangunan gedung (S1T2) 2. Peningkatan <i>awarness</i> kepada masyarakat mengenai tindakan awal penanganan kebakaran (S2T1)	1. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sampai dengan tingkat Kelurahan dalam pembentukan dan pembinaan anggota relawan penanganan kebakaran (W2T1)

Berdasarkan perumusan alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan arah kebijakan Kota Surakarta dalam mewujudkan tujuan Dinas Pemadam Kebakaran berupa ”Mewujudkan ketahanan Kota melalui perlindungan risiko bencana kebakaran dan non kebakaran”.

3.4 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan memiliki peranan penting sebagai pedoman yang mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan berfungsi untuk memprioritaskan kegiatan dan merasionalisasi pilihan strategi sehingga pelaksanaan program lebih fokus dan efektif. Arah kebijakan yang dijadikan dasar dalam rangka pelaksanaan strategi tertera pada tabel berikut :

Tabel 16. Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan – Dinas Damkar	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Optimalisasi sistem koordinasi antara Satpol PP, kepolisian, BPBD, dan pemadam kebakaran untuk respons terpadu.	• Integrasi sistem antara Damkar dengan Dinas OPD terkait sehingga penanganan kebakaran maupun penyelamatan dapat dilakukan lebih cepat dan bersamaan. • Optimalisasi penggunaan platform media sosial dengan kemasan konten materi yang bersahabat dengan masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	• Pelayanan publik yang tangkas (<i>agile</i>), adaptif, inovatif, berbasis digital • Membangun budaya partisipasi publik berbasis digital • Perluasan integrasi perizinan yang adaptif terhadap risiko bencana kebakaran.
2		Mewujudkan wilayah berketahanan ekologi melalui kerjasama wilayah dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan	• Bekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki fasilitas pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran. • Meningkatkan peran serta masyarakat terkait penanganan, pencegahan, dan	Penguatan landasan harmonisasi OPD, kewilayahan, masyarakat, dan relawan dalam menangani bencana kebakaran dan penyelamatan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan – Dinas Damkar	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			penyelamatan kebakaran maupun non kebakaran dengan pemberian edukasi. • Menjalin kemitraan dengan komunitas pecinta hewan dalam penanganan dan penyelamatan • Bekerjasama dengan PD tingkat kelurahan dan kecamatan dalam pembentukan dan pembinaan satgas relawan penanganan kebakaran	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Dalam penyusunan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, memedomani pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 yang mengatur tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah beserta permutakhirannya. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Surakarta dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Surakarta tahun 2025-2029.

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Berikut terlampir Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang merupakan penyelarasan dari tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surakarta

Tabel 17. Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks	81	82	83	84	85	86

Dinas Pemadam Kebakaran memiliki 2 (dua) Program. Adapun penjabaran program tertera sebagaimana berikut :

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Program ini merupakan program teknis yang berkaitan sebagai upaya sistematis untuk mencegah, menangani, dan menyelamatkan dari kebakaran serta kejadian

non-kebakaran lainnya. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan melalui edukasi dan inspeksi, hingga penanggulangan dan penyelamatan saat terjadi kebakaran atau kejadian darurat lainnya.

Program ini mencakup pencegahan kebakaran melalui identifikasi risiko, penggunaan alat pemadam, pelatihan evakuasi, serta penanganan cepat saat kebakaran terjadi, termasuk pemadaman dan penyelamatan korban. Sedangkan mengenai pencegahan, penanganan dan penyelamatan non kebakaran berkaitan seperti penanganan kejadian darurat non-kebakaran serta penyelamatan korban dalam situasi darurat.

Adapun pencegahan non kebakaran meliputi :

- Penyuluhan dan edukasi, meliputi pemberian informasi kepada masyarakat tentang potensi bahaya dan cara mencegah kejadian non-kebakaran.
- Inspeksi, meliputi pemeriksaan berkala terhadap fasilitas dan lingkungan untuk mengidentifikasi potensi risiko non-kebakaran, seperti kondisi bangunan, instalasi listrik, dan jalur evakuasi.
- Pemberdayaan Masyarakat mencakup melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan, misalnya melalui pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) dan simulasi evakuasi.
- Pengawasan, berkaitan dengan pemantauan dan memastikan ketersediaan serta fungsi sarana dan prasarana yang mendukung keselamatan, seperti alat pemadam kebakaran dan jalur evakuasi.

Sedangkan penanganan non kebakaran, meliputi :

- Penanganan keadaan darurat, berkaitan dengan pemberian respon cepat dan tepat terhadap berbagai situasi darurat non-kebakaran, seperti kecelakaan lalu lintas, tanah longsor, banjir, dan lainnya.
- Evakuasi, melakukan evakuasi terhadap korban dan warga yang terdampak bencana atau kejadian darurat lainnya.
- Penanganan bahan berbahaya, menangani dan mengevakuasi bahan berbahaya yang mungkin tumpah atau bocor dalam suatu kejadian.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang ini bersifat administratif dan operasional, yang dirancang untuk memfasilitasi OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Program ini mencakup:

- Administrasi Umum, meliputi kegiatan surat menyurat, pengelolaan arsip, penyusunan laporan, dan kegiatan tata usaha lainnya.
- Keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
- Kepegawaian, meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, dan pengelolaan mutasi/promosi.
- Operasional, meliputi penyediaan sarana dan prasarana kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, serta kegiatan operasional lainnya yang mendukung kelancaran tugas OPD.

Untuk menunjang pencapaian dari program yang telah disusun sebelumnya, penjabaran program perlu dilakukan dalam bentuk kegiatan yang juga akan berkontribusi nyata pada pencapaian visi dan misi. Dalam penyusunan kegiatan perlu ditetapkan juga indikator sebagai alat ukur evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan berfokus pada program utama yakni **Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**, berikut kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja dari program tersebut:

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalkan risiko kebakaran, mengendalikan penyebaran api, memadamkan kebakaran, menyelamatkan korban, dan menangani dampak dari bahan berbahaya dan beracun yang terlibat dalam kebakaran.

Adapun subkegiatan untuk mendukung dalam kegiatan ini adalah:

- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
- Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

2. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

Dalam kegiatan ini merupakan upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban yang berada dalam kondisi bahaya. Operasi ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pemantauan dan kesiapsiagaan, hingga pelaksanaan operasi dan pengakhiran.

Untuk pencapaian kegiatan ini didukung oleh subkegiatan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
- Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

3. Inspeksi Proteksi Kebakaran

Merupakan kegiatan pemeriksaan sistem dan peralatan pemadam kebakaran untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan siap digunakan dalam kondisi darurat. Inspeksi ini penting untuk mencegah kebakaran, meminimalkan risiko kerugian, dan memastikan keselamatan penghuni bangunan.

Tujuan dari Inspeksi Proteksi Kebakaran adalah:

- Mendeteksi potensi kerusakan

Memastikan semua sistem dan peralatan berfungsi sesuai standar dan siap digunakan.

- Mencegah kebakaran

Mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi masalah besar.

- Meminimalkan kerugian

Mengurangi dampak kerugian material dan korban jiwa jika terjadi kebakaran.

- Memenuhi standar keselamatan

Memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan kebakaran yang berlaku.

4. Investigasi Kejadian Kebakaran.

Meliputi serangkaian kegiatan untuk menentukan penyebab kebakaran, mengumpulkan bukti, dan menyimpulkan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Investigasi ini juga mencakup pemeriksaan lokasi kebakaran, pengumpulan sampel, dan analisis di laboratorium

Adapun tujuan dari Investigasi Kejadian Kebakaran Adalah:

- Menentukan penyebab kebakaran secara akurat
- Mencegah kejadian kebakaran serupa di masa depan
- Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk proses hukum, klaim asuransi dan perbaikan system keselamatan
- Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang bahaya kebakaran

5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

Merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya kebakaran serta bagaimana cara mencegah dan menanggulangnya. Hal ini melibatkan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung pencegahan kebakaran.

Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tanggap terhadap potensi kebakaran. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana kebakaran. Dengan meningkatkan kesadaran,

pengetahuan, dan keterampilan masyarakat, kita dapat mengurangi risiko kebakaran dan meminimalkan dampak buruknya

Pengukuran pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga dilakukan melalui Indikator Kinerja Daerah. Berikut adalah Indikator Kinerja Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.

Tabel 18. Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
URUSAN TRANTIBUMLINMAS								
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
2	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	7	7	7	7	7	7
FUNGSI PENUNJANG								
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	79	79.5	80	80.5	81	81
4	Indeks Pelayanan Publik UPP	Nilai	4.81	4.83	4.85	4.87	4.89	5
5	Indeks Kepuasan Masyarakat UPP	Nilai	95	95	96	96	97	97

Secara rinci rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2026 – 2030 dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
Misi ke-5 : Ketahanan Kota dan Kerjasama antar Wilayah yang Terpadu dan Berkelanjutan							
	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Pemadam Kebakaran		
		Meningkatnya kualitas pelayanan pemadaman dan penanganan kebakaran			Tingkat waktu tanggap (respon time rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK) dari pangkalan pemadam kebakaran prevalensi		
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		Cakupan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Meningkatnya Pencegahan,	Persentase keberhasilan Pencegahan, Pengendalian,	Pencegahan, Pengendalian,	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Kebakaran	Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
				Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa di perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan <i>real time</i> yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan setiap tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa di perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan <i>real time</i> yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan setiap tahunnya	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	
				Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kotadalam	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Pencegahan, PenanggulanganKebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Meningkatnya penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
				Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Meningkatnya cakupan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Meningkatnya Inspeksi Proteksi Kebakaran	Presentase gedung yang diinspeksi	Inspeksi Proteksi Kebakaran	
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
				Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Jumlah Investigasi Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
				Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL).	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
				Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/ Kelurahan yang	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Tersedia Dukungan Supras Damkar	melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	
		Meningkatkan kualitas dan Efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien.			Nilai Maturitas Kelembagaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Nilai SAKIP		
					Nilai SKM		
					Nilai SPIP		
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas.	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya administrasi keuangan pernakat daerah.	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Tersedianya administrasi umum perangkat daerah.	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	
				Terlaksananya Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Air dan Listrik yang Disediakan		
				Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ter rehabilitasi/terpelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Terlaksanannya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksanannya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksanannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanannya Administrasi Barang Milik Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

Tabel 20. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Pro- gram/ Outcome/Ke- giatan/Subke- giatan/ Output	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Dan Sub Kegiatan (Output)	Baseli- ne 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	1.112.954.500,00	100	1.157.472.680,00	100	1.203.771.588,00	100	1.251.922.451,00	100	1.301.999.349,00	100	6.028.120.568,00
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keberhasilan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Kebakaran	100	100	723.773.831,00	100	752.724.784,00	100	782.833.775,00	100	814.147.126,00	100	846.713.011,00	100	3.920.192.527,00
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	100	12	490.401.831,00	12	510.017.904,00	12	480.418.619,00	12	551.635.361,00	12	573.700.772,00	60	2.606.174.487,00

Bidang Urusan/Progr ram/ Outcome/Ke giatan/Subke giatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Dan Sub Kegiatan (Output)	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	100	12	23.562.000,00	12	24.504.480,00	12	25.484.660,00	12	26.504.047,00	12	27.564.209,00	60	127.619.396,00
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	umlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	45	15	45.600.000,00	15	44.304.000,00	15	46.076.160,00	15	47.919.207,00	15	49.835.976,00	75	230.735.343,00
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang dapat di Perbaharui Secara Berkala, Berkelanj utan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/	10	1	35.850.000,00	1	37.284.000,00	1	38.775.360,00	1	40.326.375,00	1	41.939.430,00	5	194.175.165,00

Bidang Urusan/Pro- gram/ Outcome/Ke- giatan/Subke- giatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Dan Sub Kegiatan (Output)	Baseli- ne 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Kelurahanoleh Desa/Kelurahan													
Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulang- an Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0	0	-	0	-	1	50.000.000,00	0	-	0	-	1	50.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulang- an Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	15.000.000,00	1	15.600.000,00	1	16.224.000,00	1	16.872.960,00	1	17.547.879,00	5	81.244.839,00
Penyelenggar- aan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulang- an, Penyelamatan Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	1	4.800.000,00	1	4.992.000,00	1	5.191.680,00	1	5.399.348,00	1	5.615.322,00	5	25.998.350,00

Bidang Urusan/Pro- gram/ Outcome/Ke- giatan/Subke- giatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Dan Sub Kegiatan (Output)	Baseli- ne 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
dan Penyelamatan Non Kebakaran														
Penyelenggar- aan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayak- an Manusia	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100	100	111.560.000,00	100	116.022.400,00	100	120.663.296,00	100	125.489.828,00	100	130.509.423,00	100	604.244.947,00
Penyelenggar- aan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayak- an, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12	12	74.000.000,00	12	76.960.000,00	12	80.038.400,00	12	83.239.936,00	12	86.569.534,00	60	400.807.870,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayak- an Manusia/Peny- elamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1	1	15.000.000,00	1	15.600.000,00	1	16.224.000,00	1	16.872.960,00	1	17.547.879,00	5	81.244.839,00

Bidang Urusan/Progr am/ Outcome/Ke giatan/Subke giatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Dan Sub Kegiatan (Output)	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayak an Manusia/Peny elamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1	1	22.560.000,00	1	23.462.400,00	1	24.400.896,00	1	25.376.932,00	1	21.057.454,08	5	21.899.752,24
Program Pencegahan, Penanggulang an, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	100	100	389.180.669,00	100	404.747.896,00	100	420.937.812,00	100	437.775.324,00	100	455.286.337,00	100	2.107.928.038,00
Inspeksi Proteksi Kebakaran	Presentase gedung yang diinspeksi	100	100	60.953.500,00	100	63.391.640,00	100	65.927.306,00	100	68.564.399,00	100	71.306.975,00	100	330.143.820,00
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	60	12	60.953.500,00	12	63.391.640,00	12	65.927.306,00	12	68.564.399,00	12	71.306.975,00	12	330.143.820,00
Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Jumlah Investigasi Kebakaran	100	100	34.437.000,00	100	35.814.480,00	100	37.247.060,00	100	38.736.943,00	100	40.286.421,00	100	186.521.904,00

Bidang Urusan/Progr am/ Outcome/Ke giatan/Subke giatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Dan Sub Kegiatan (Output)	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	10	12	34.437.000,00	12	35.814.480,00	12	37.247.060,00	12	38.736.943,00	12	40.286.421,00	60	186.521.904,00
Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah	100	100	293.790.169,00	100	305.541.776,00	100	317.763.446,00	100	330.473.982,00	100	343.692.941,00	100	1.591.263.314,00
Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	800	1200	230.629.000,00	1400	239.854.160,00	1600	249.448.325,00	1800	259.426.255,00	2000	269.803.305,00	7000	1.249.161.045,00

Bidang Urusan/Pro- gram/ Outcome/Ke- giatan/Subke- giatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Dan Sub Kegiatan (Output)	Baseli- ne 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	54	10	34.800.000,00	10	36.192.000,00	10	37.639.680,00	10	39.145.268,00	14	40.711.079,00	54	188.488.027,00
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL (Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan) Desa/ Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	1	1	28.361.169,00	1	29.495.616,00	1	30.675.441,00	1	31.902.459,00	1	33.178.557,00	5	153.613.242,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.004.914.016	100	13.525.110.577	100	14.066.115.000	100	14.628.759.600	100	15.213.909.984	100	70.438.809.177
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	78,85	79		79.50		80		80.50		81		81	
	Indeks Kepuasan Masyarakat UPP	94,65	95		95		96		96		97		97	
	Indeks Pelayanan Publik UPP	4.81	4.83		4.85		4.87		4.89		5		5	

Bidang Urusan/Progr am/ Outcome/Ke giatan/Subke giatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Dan Sub Kegiatan (Output)	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100	100	39.300.000,00	100	40.872.000,00	100	42.506.880,00	100	44.207.156,00	100	45.975.443,00	100	212.861.479,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	25.000.000,00	2	26.000.000,00	2	27.040.000,00	2	28.121.600,00	3	29.246.464,00	11	135.408.064,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	2	6.300.000,00	2	6.552.000,00	2	6.814.080,00	2	7.086.644,00	2	7.370.110,00	10	34.122.834,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	2	3.000.000,00	2	3.120.000,00	2	3.244.800,00	2	3.374.592,00	2	3.509.576,00	10	16.248.968,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5.000.000,00	5	5.200.000,00	5	5.408.000,00	5	5.624.320,00	5	5.849.293,00	25	27.081.613,00

Bidang Urusan/Pro- gram/ Outcome/Ke- giatan/Subke- giatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Dan Sub Kegiatan (Output)	Baseli- ne 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	100	10.370.314.016,00	100	10.425.126.577,00	100	11.154.131.640,00	100	11.600.296.904,00	100	12.064.308.771,00	100	55.614.177.908,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	104	10.370.314.016,00	126	10.425.126.577,00	131	11.154.131.640,0 0	136	11.600.296.904,00	141	12.064.308.771,00	638	55.614.177.908,00
Administrasi Kepegawaia- n Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100	100	355.000.000,00	100	369.200.000,00	100	383.968.000,00	100	399.326.720,00	100	415.299.790,00	100	1.922.794.510,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap- nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	260.000.000,00	1	270.400.000,00	1	281.216.000,00	1	292.464.640,00	1	304.163.226,00	5	1.408.243.866,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	20	5.000.000,00	20	5.200.000,00	20	5.408.000,00	20	5.624.320,00	20	5.849.293,00	100	27.081.613,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	90.000.000,00	1	93.600.000,00	1	97.344.000,00	1	101.237.760,00	1	105.287.271,00	4	487.469.031,00

Bidang Urusan/Progr am/ Outcome/Ke giatan/Subke giatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Dan Sub Kegiatan (Output)	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	197.000.000,00	100	204.880.000,00	100	213.075.200,00	100	221.598.208,00	100	230.462.140,00	100	1.067.015.548,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4	15.000.000,00	4	15.600.000,00	4	16.224.000,00	4	16.872.960,00	4	17.547.897,00	20	81.244.839,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	12	65.000.000,00	12	67.600.000,00	12	70.304.000,00	12	73.116.160,00	12	76.040.807,00	60	352.060.967,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	12	18.000.000,00	12	18.720.000,00	12	19.468.800,00	12	20.247.552,00	12	21.057.455,00	60	97.493.807,00
Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	90.000.000,00	12	93.600.000,00	12	97.344.000,00	12	101.237.760,00	12	105.287.271,00	60	487.469.031,00
Fasilitasi kunjungan tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	4	4.000.000,00	4	4.160.000,00	4	4.326.400,00	4	4.499.456,00	4	4.679.435,00	20	21.665.291,00
Penatausahaa n arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	1	5.000.000,00	1	5.200.000,00	1	5.408.000,00	1	5.624.320,00	1	5.849.293,00	5	27.081.613,00

Bidang Urusan/Pro- gram/ Outcome/Ke- giatan/Subke- giatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Dan Sub Kegiatan (Output)	Baseli- ne 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	100	40.000.000,00	100	401.600.000,00	100	105.664.000,00	100	109.890.560,00	100	114.286.183,00	100	771.440.743,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	1	30.000.000,00	1	31.200.000,00	1	32.448.000,00		33.745.920,00	2	35.095.757,00	5	162.489.677,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	5.000.000,00	1	5.200.000,00	1	5.408.000,00	1	5.624.320,00	1	5.849.293,00	4	27.081.613,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	5.000.000,00	1	5.200.000,00	1	5.408.000,00	1	5.624.320,00	1	5.849.293,00	4	27.081.613,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	-	1	300.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	300.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	-	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	54.080.000,00	1	56.243.200,00	5	212.323.200,00

Bidang Urusan/Pro- gram/ Outcome/Ke- giatan/Subke- giatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Dan Sub Kegiatan (Output)	Baseli- ne 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	-	1	10.000.000,00	1	10.400.000,00	1	10.816.000,00	1	11.248.640,00	5	42.464.640,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	1.673.300.000,00	100	1.740.232.000,00	100	1.809.841.280,00	100	1.882.234.932,00	100	1.957.524.331,00	100	9.063.132.543,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	4.800.000,00	12	4.992.000,00	12	5.191.680,00	12	5.399.348,00	12	5.615.322,00	48	25.998.350,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	159.500.000,00	12	165.880.000,00	12	172.515.200,00	12	179.415.808,00	12	186.592.441,00	48	863.903.449,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	4	9.000.000,00	4	9.360.000,00	4	9.734.400,00	4	10.123.776,00	4	10.528.728,00	20	48.746.904,00
Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	12	1.500.000.000,00	12	1.560.000.000,00	12	1.622.400.000,00	12	1.687.296.000,00	12	1.754.787.840,00	48	8.124.483.840,00

Bidang Urusan/Pro- gram/ Outcome/Ke- giatan/Subke- giatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Dan Sub Kegiatan (Output)	Baseli- ne 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Umum Kantor	Umum Kantor yang Disediakan													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	100	320.000.000,00	100	332.800.000,00	100	346.112.000,00	100	359.956.480,00	100	374.354.740,00	100	1.733.223.220,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	28	250.000.000,00	28	260.000.000,00	28	270.400.000,00	28	281.216.000,00	28	292.464.640,00	28	1.354.080.640,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12	10	5.000.000,00	10	5.200.000,00	10	5.408.000,00	10	5.624.320,00	10	5.849.293,00	50	27.081.613,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	20	40.000.000,00	20	41.600.000,00	20	43.264.000,00	20	44.994.560,00	20	46.794.343,00	100	216.652.903,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	4	4	25.000.000,00	4	26.600.000,00	4	27.040.000,00	4	28.121.600,00	4	29.246.464,00	20	135.408.064,00

Bidang Urusan/Progr ram/ Outcome/Ke giatan/Subke giatan/ Output	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Dan Sub Kegiatan (Output)	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanannya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	5.000.000,00	100	5.200.000,00	100	5.408.000,00	100	5.624.320,00	100	5.849.293,00	100	27.081.613,00
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	1	5.000.000,00	1	5.200.000,00	1	5.408.000,00	1	5.624.320,00	1	5.849.293,00	1	27.081.613,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanannya Administrasi Barang Milik Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	5.000.000,00	100	5.200.000,00	100	5.408.000,00	100	5.624.320,00	100	5.849.293,00	100	27.081.613,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	5.000.000,00	1	5.200.000,00	1	5.408.000,00	1	5.624.320,00	1	5.849.293,00	1	27.081.613,00
TOTAL				14.117.868.516,00		14.682.583.256,00		15.269.886.587,00		15.880.682.049,00		16.515.909.331,00		76.466.929.742,00

4.2 URAIAN KEGIATAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai penjabaran lebih lanjut dari program yang telah disusun. Bahwasanya kegiatan mencakup tindakan atau aktivitas yang spesifik untuk mencapai tujuan program. Walaupun berisikan penjabaran dari program, dalam penyusunan kegiatan tetap harus memperhatikan kontribusi nyata pada pencapaian visi dan misi. Dalam penyusunan kegiatan perlu ditetapkan juga indikator sebagai alat ukur evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut terlampir penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta periode 2025-2030.

Tabel 21. Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
URUSAN TRANTIBUMLINMAS								
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
2	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	7	7	7	7	7	7
FUNGSI PENUNJANG								
3	Nilai AKIP	Nilai	79	79.5	80	80.5	81	81
4	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,81	4,83	4,85	4,87	4,89	5
5	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	95	95	96	96	97	97

4.3 SUB KEGIATAN DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang pelaksanaannya disusun melalui penetapan program-program prioritas. Program prioritas ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi permasalahan pembangunan daerah yang kemudian disinkronisasikan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah pada tahun rencana. Dalam hal ini tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Untuk itu, perumusan prioritas pembangunan daerah sebagai kerangka dalam menyusun strategi pembangunan harus dilakukan secara cermat.

Sebagai upaya pencapaian target program prioritas Kota Surakarta, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki peran dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui penyelarasan

sub kegiatan ataupun inventarisasi daftar sub kegiatan prioritas perangkat daerah dengan dengan program prioritas pembangunan daerah. Kota Surakarta memiliki Program Unggulan yang disebut juga sebagai Asta Cita Surakarta yakni :

1. Program pengembangan kompetensi dan peluang kerja berbasis ekosistem ketenagakerjaan
2. Program penguatan daya saing UMKM berbasis ekosistem bisnis
3. Program posyandu plus berbasis standar pelayanan minimal
4. Program optimalisasi BUMD dan Pendapatan Asli Daerah
5. Program penguatan daya saing kota berbasis budaya, pariwisata olahraga, dan ekonomi kreatif
6. Program penguatan ruang publik yang inklusif
7. Program Surakarta *Smart City*
8. Program pengembangan pusat distribusi logistik untuk ketahanan pangan

Berdasarkan program prioritas Kota Surakarta di atas, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki peranan dalam berkontribusi menyukseskan Program Asta Cita Kota Surakarta yaitu **”Program posyandu plus berbasis standar pelayanan minimal”**, **”Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah”**, dan **”Surakarta Smart City”**.

4.3.1 Program Posyandu Plus Berbasis Standar Pelayanan Minimal

Program posyandu plus berbasis standar pelayanan minimal mendukung Integrasi Layanan Primer (ILP) yang mencakup 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal yaitu pendidikan, kesehatan (promotif dan preventif), pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Dengan kolaborasi lintas sektor, Posyandu Plus menjadi pusat layanan masyarakat yang lebih adaptif dan inklusi.

Penyelarasan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran untuk mendukung Integrasi Layanan Primer (ILP) dapat dicerminkan melalui tingkat waktu tanggap (*response time rate*) di daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Pemadam Kebakaran Prevalensi). Penyelarasan sub kegiatan ataupun inventarisasi daftar sub kegiatan prioritas perangkat daerah dengan dengan program prioritas pembangunan daerah antara lain yakni:

1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Yakni merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah, mendeteksi, dan memadamkan kebakaran, serta meminimalkan dampak negatifnya terhadap

masyarakat dan lingkungan. Ini mencakup upaya pencegahan, seperti penyuluhan dan inspeksi, serta tindakan penanggulangan, termasuk pemadaman api dan evakuasi. Kecepatan waktu tanggap (*response time rate*) dapat menyelamatkan nyawa, harta benda, dan lingkungan dari kerusakan akibat kebakaran, serta meminimalkan kerugian akibat kebakaran, dan memastikan pemulihan yang cepat setelah terjadi kebakaran.

2. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Merupakan serangkaian tindakan untuk mengeluarkan korban dari area berbahaya dan memindahkan mereka ke tempat yang aman, baik saat terjadi kebakaran maupun dalam situasi darurat lainnya. Ketersediaan tim penyelamat yang siap memberikan respon cepat terhadap kondisi yang membahayakan manusia meminimalkan dampak kebakaran.

3. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana dan situasi darurat yang mencakup upaya bersama dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non-kebakaran. Kerjasama ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat. Dengan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi yang baik, diharapkan penanganan kebakaran dan non-kebakaran dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

4. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Merupakan upaya pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dalam menangani situasi darurat yang melibatkan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia. Ini mencakup pelatihan dalam teknik penyelamatan, evakuasi, dan penggunaan peralatan yang diperlukan untuk kondisi berbahaya. Pemberian pelatihan diharapkan agar aparaturnya siap, terampil dan mampu merespons dengan cepat dan efektif dalam situasi darurat

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Relawan

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) memiliki peran penting dalam responsif gender dengan memastikan kesetaraan akses dan partisipasi dalam pelayanan, serta

menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi semua gender. Ini termasuk memastikan bahwa pelatihan, peralatan, dan penanganan darurat mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya. Pentingnya responsif gender di Dinas Pemadam Kebakaran :

- Akses yang Setara

Responsif gender memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki akses yang sama terhadap layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Ini termasuk akses ke informasi, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan untuk melindungi diri dan keluarga mereka dari bahaya kebakaran.

- Partisipasi yang Setara

Responsif gender juga berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam profesi pemadam kebakaran. Ini bisa dilakukan melalui perekrutan, pelatihan, dan promosi yang adil, serta memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan inklusif bagi semua orang.

- Penyediaan Layanan yang Responsif

Dinas Pemadam Kebakaran perlu mempertimbangkan perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam penanganan kebakaran dan situasi darurat lainnya. Misalnya, dalam evakuasi, perlu ada perhatian khusus terhadap perempuan hamil, anak-anak, dan lansia, yang mungkin memiliki kebutuhan khusus.

6. Peranan dinas pemadam kebakaran terhadap kelompok rentan

Selain responsif gender, dinas pemadam kebakaran perlu memperhatikan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas karena memiliki peranan penting dalam dinas pemadam kebakaran terutama dalam konteks penanggulangan bencana. Peran mereka mencakup partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi upaya penanggulangan bencana, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas diri sendiri. Dinas Damkar perlu melibatkan kelompok rentan ini secara aktif untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan bencana inklusif dan efektif bagi semua lapisan masyarakat. Berikut adalah beberapa peran spesifik kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, dalam dinas Pemadam Kebakaran :

Keterlibatan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan

- Partisipasi dalam Perencanaan

Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perlu dilibatkan dalam proses perencanaan penanggulangan bencana, baik pra-bencana, saat bencana, maupun pasca-bencana. Hal ini memastikan bahwa kebutuhan dan potensi mereka diperhitungkan dalam setiap tahap.

- **Koordinasi Tanggap Darurat**

Dinas Damkar perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan penyandang disabilitas, untuk memastikan respons tanggap darurat yang efektif dan inklusif.

- **Peningkatan Kapasitas**

Dinas Damkar dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok rentan agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menghadapi bencana, serta berpartisipasi aktif dalam upaya penyelamatan.

Peran dalam Penyelamatan dan Evakuasi

- **Evakuasi Korban Disabilitas**

Dinas Damkar perlu melatih personelnya untuk mengevakuasi penyandang disabilitas dengan aman dan efektif, mengingat adanya keterbatasan fisik dan aksesibilitas.

- **Penyediaan Fasilitas Khusus**

Di posko pengungsian, perlu disediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas fisik, toilet khusus, dan bantuan komunikasi.

- **Pendampingan dan Konseling**

Dinas Damkar dapat bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memberikan pendampingan psikologis dan konseling bagi penyandang disabilitas yang terdampak bencana.

4.3.2 Program optimalisasi BUMD dan Pendapatan Asli Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran memiliki peranan dalam Pendapatan Asli Daerah melalui pelaksanaan kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah melalui indikator berupa Persentase Terlaksanannya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun realisasi contoh kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam Pendapatan Asli Daerah yakni:

- 1 Kewajiban bagi pelaku usaha yang bekerja di dalam gedung (contoh : Pusat Perbelanjaan, Hotel, Rumah Sakit, Gedung Perkantoran, Ruko, Stasiun, Terminal, Lokasi Wisata, Bandara, dan tempat umum lainnya) untuk mengadakan pelatihan simulasi kebakaran dan tanggap bencana kebakaran).
- 2 Menjadikan pelatihan tindakan tanggap bencana kebakaran sebagai materi pendidikan tambahan dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah (TK sd SMA/SMU/SMK).
- 3 Melakukan sosialisasi tindakan pencegahan bencana kebakaran rumah tangga dalam forum kegiatan di Kelurahan.

4.3.3 Program Surakarta *Smart City*

Program Surakarta *Smart City* mengoptimalkan *AI Command Center* dan *Big Data Analytics* untuk menghadirkan sistem tata kelola kota yang berbasis data *real-time* yang mendukung 6 (enam) dimensi kota cerdas yaitu "*Smart Branding, Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment, dan Smart Society.*"

Pada program ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta melakukan penyelarasan beberapa sub kegiatan prioritas perangkat daerah dengan program prioritas pembangunan daerah tersebut, antara lain:

1. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK).

Adalah suatu sistem terpadu yang dirancang untuk mengelola informasi dan komunikasi terkait kebakaran dan upaya penyelamatan. SKIK bertujuan untuk memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait dalam penanggulangan kebakaran, mulai dari deteksi dini, pemadaman, hingga evakuasi korban. Dengan integrasi system yang terkelola dengan baik maka potensi kebakaran dapat terdeteksi lebih cepat, informasi dapat tersampaikan dengan cepat dan akurat ke seluruh pihak terkait, serta dampak kebakaran dapat diminimalisir.

2. Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP).

Merupakan proses pembuatan dokumen yang memuat perencanaan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan di suatu wilayah, seperti perkotaan. RISPKP ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan kebakaran yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan. RISPKP dirancang untuk

meningkatkan keselamatan dan ketahanan wilayah terhadap bahaya kebakaran dengan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, termasuk penataan ruang, perizinan, dan pembangunan Gedung. Dengan adanya RISPKP potensi bahaya kebakaran di berbagai wilayah, seperti pemukiman, pusat ekonomi, dan fasilitas publik dapat lebih mudah diidentifikasi dan dipetakan.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.

Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan, termasuk penyelamatan dan evakuasi, adalah upaya penting untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kondisi membahayakan manusia. Ini melibatkan penyediaan peralatan, perlengkapan, dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan, serta pelatihan yang diperlukan untuk memastikan kesiapan dan efektivitas dalam menangani situasi darurat. Dengan tersedianya alat komunikasi (radio, telepon satelit), GPS, peralatan navigasi, detektor logam, alat penerangan, dan peralatan pendukung lainnya, termasuk kendaraan evakuasi (mobil, helikopter, perahu), tali, jaring, dan peralatan pendukung lainnya memungkinkan tim SAR untuk beroperasi di berbagai medan dan kondisi, termasuk daerah terpencil atau area yang sulit dijangkau.

4. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.

Merupakan kegiatan pencatatan dan pendataan seluruh fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran. Kegiatan ini mencakup inventarisasi berbagai sistem dan peralatan seperti detektor asap, alarm kebakaran, alat pemadam api (*portable* dan tetap), sistem sprinkler, hidran, serta perlengkapan pelindung diri bagi petugas pemadam kebakaran. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui lokasi dan jenis potensi bahaya kebakaran di suatu area atau bangunan serta memastikan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana proteksi kebakaran dalam kondisi siap pakai.

5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.

Adalah serangkaian upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat agar mampu secara mandiri melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sejak dini. Hal ini mencakup memberikan informasi tentang penyebab kebakaran, cara pencegahan, serta tindakan yang harus diambil saat terjadi kebakaran. Dengan dilakukannya

sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran diharapkan masyarakat mampu dan mandiri dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah kebakaran serta berfokus pada tindakan untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan api, dan memastikan instalasi listrik berfungsi dengan baik.

Peta keterkaitan antara subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Posyandu Plus Berbasis Standar Pelayanan Minimal.	Integrasi SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Sosial, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Trantibum & Linmas	SPM Dinas Damkar dapat dicerminkan salah satunya adalah Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) di daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK dari pangkalan Pemadam Kebakaran Prevalensi) melalui sub kegiatan berikut: • Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota • Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran • Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Ketepatan waktu dalam pengendalian kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran yang ditunjang pula dengan keterampilan para Aparatur pencarian dan pertolongan.

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran • Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
2	Optimalisasi BUMD dan Pendapatan Asli Daerah	Terlaksanannya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota.	Optimalisasi Pendapatan Asli daerah dapat diwujudkan melalui Subkegiatan berupa Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Realiasi pelaksanaan subkegiatan dapat dilakukan dengan contoh berupa : 1. Kewajiban bagi pelaku usaha yang bekerja didalam gedung (contoh : Pusat Perbelanjaan, Hotel, Rumah Sakit, Gedung Perkantoran, Ruko, Stasiun, Teminal, Lokasi Wisata, Bandara, dan tempat umum lainnya) untuk mengadakan pelatihan simulasi kebakaran.

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2. Menjadikan pelatihan tindakan tanggap bencana kebakaran sebagai materi pendidikan tambahan dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah (TK sd SMA/SMU/SMK). 3. Melakukan sosialisasi tindakan pencegahan bencana kebakaran rumah tangga dalam forum kegiatan di Kelurahan.
3	Surakarta Smart City mengoptimalkan <i>AI Command Center</i> dan <i>Big Data Analytics</i> untuk menghadirkan sistem tata kelola kota yang berbasis data <i>real-time</i> yang mendukung 6 (enam) dimensi kota cerdas yaitu <i>Smart Branding, Smart</i>	• <i>Smart Governance</i> (Digitalisasi layanan publik dan transparansi) • <i>Smart Environment</i> (Pengelolaan lingkungan berkelanjutan) • <i>Smart Living</i> (Kualitas hidup sehat, nyaman, dan aman)	Surakarta <i>Smart City</i> dapat diwujudkan salah satunya dengan daya dukung Dinas Pemadam Kebakaran melalui Subkegiatan berikut : • Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa di perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan <i>real time</i> yang dimiliki oleh Desa/ Kelurahan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment, dan Smart Society</i> dengan integrasi teknologi yang dapat menunjukkan lokasi secara presisi guna meningkatkan respons terhadap berbagai situasi, termasuk keamanan, bencana, dan pelayanan publik.		• Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) • Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi • Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran • Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	setiap tahunnya sehingga memudahkan dalam monitoring kebutuhan sarana dan prasarana untuk menindaklanjuti tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

4.4.1 Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan kebakaran	Nilai		82	83	84	85	86	

4.4.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surakarta. Target indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Pemadam Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 24. Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN TRANTIBUMLINMAS									
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	
2	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	-	4,94	7	7	7	7	7	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Surakarta untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemadaman kebakaran dan penyelamatan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemadam Kebakaran. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta 2025- 2029. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran.

Permasalahan kebakaran dan penyelamatan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota. Tahap ketiga adalah upaya beradaptasi dengan perkembangan sistem teknologi informasi (IT) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Hal tersebut sejalan dalam mendukung program prioritas Kota Surakarta yakni ”*Smart City*”. Adaptasi ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem pelaporan, komunikasi, dan penyebaran cakupan informasi penanganan, pencegahan, dan penyelamatan kebakaran maupun non kebakaran hingga penggunaan teknologi canggih.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pemadam Kebakaran. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya

manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Pemadam Kebakaran sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan secara optimal dan terpadu. Semoga Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Surakarta.